

# REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

## **TAHUN 2017**

### PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA



**PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
PALANGKA RAYA KELAS I A**

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111  
Palangka Raya - Kalimantan Tengah  
Telepon / Fax (0536) 3221940  
Website : [www.pn-pangkaraya.go.id](http://www.pn-pangkaraya.go.id)  
Email : pnpalangkaraya1@gmail.com

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA**



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H.,M.H  
NIP. 19570503 198403 1 002

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH  
NIP. 19610912 198803 1 003

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	70%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase petikan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	80%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	85%
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	85%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	45%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif	85%
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%

b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%
c. Ikut mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
d. Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	75%
e. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 10.290.297.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 342.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 165.860.000,-

Palangka Raya, Januari 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H.,M.H  
NIP. 19570503 198403 1 002

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH  
NIP. 19610912 198803 1 003